

IMPLEMENTASI PROGRAM PENAMBAHAN JARINGAN SAMBUNGAN AIR DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BULUKUMBA

Vira Yuniar^{1*}, Lukman Hakim², Hamdan³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstrak

The purpose of this study was to determine the effectiveness of tax services at the tax counseling and counseling service office for the Selayar Islands Regency. This study uses a qualitative method. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Informants in the study consisted of 5 (five) Communications. Where in indicator 1) communication, the most important condition for the success of a program is if the communication between several elements involved in implementing the program is well established. 2) The approach in the implementation of a service, staff or employees are the main key to the success of the service. In the implementation of the water connection program, the employees who directly monitor and ensure that everything is going well and in accordance with the needs and desires of the community are those who understand and understand the problems experienced by the community. 3) disposition the source of funds used for the development of the raw water unit until the production unit is funded by the central government.

Keywords: *implementation, service, water connection*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi program penambahan jaringan sambungan air di perusahaan daerah air minum (PDAM) Kabupaten Kulukumba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian terdiri dari 5 (lima) orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) komunikasi. Dimana pada indikator komunikasi, hal yang paling menjadi syarat utama kesuksesan sebuah program adalah jika komunikasi diantara beberapa elemen yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut terjalin dengan baik. 2) sumber daya. Dalam pelaksanaan program sambung air, pegawai yang turut langsung memantau dan memastikan semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat adalah mereka yang paham dan mengerti betul permasalahan yang di alami oleh masyarakat. 3) disposisi. Sumber dana yang di gunakan untuk pengembangan pada unit air baku sampai unit produksi didanai oleh pemerintah pusat.

Kata kunci: implementasi, pelayanan, sambungan air

* virayuniar@gmail.com

PENDAHULUAN

Permasalahan air bersih yang terjadi di Kabupaten Bulukumba, saat ini merupakan suatu hal yang harus di perhatikan. Banyaknya daerah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, karena asupan air dari PDAM yang sangat sulit. Permasalahan yang paling sering di alami oleh masyarakat adalah kadang air PDAM tidak mengalir, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan air hujan, air sungai, dan sebagainya. Bagi sebagian masyarakat kadang menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi pada saat musim kemarau datang kadang sumur mereka mengalami kekeringan.

Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sumber-sumber air yang ada. Dalam mengatasi permasalahan air tersebut maka diperlukan sistem penyediaan air yang mampu menyediakan air yang memenuhi standar kesehatan dimana air tersebut diambil dari sumber-sumber yang ada antara lain : air hujan, air permukaan (sungai, waduk dan danau), mata air, sumur dangkal dan lain-lain. Akan tetapi bearnya air berbeda-beda tergantung dari musim dan lokasi sumber airnya. Untuk menjamin

ketersediaan air dan pengelolaan air serta distribusi air tersebut berupa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bulukumba sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum/air bersih, dituntut untuk meningkatkan pelayanannya kepada pelanggan/masyarakat di Kabupaten Bulukumba. PDAM Kabupaten Bulukumba berusaha memanfaatkan seoptimal mungkin sumber-sumber air yang ada untuk memberikan pelayanan air bersih secara lebih teratur dalam kuantitas air yang cukup dan kualitas air yang sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Implementasi publik diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, lebih sederhana pengertian implementasi publik dalam Kamus Webster (Solichin Abdul Wahab, 1997) dalam (jamal, 2016) 47 dirumuskan sebagai “*to provide means for carrying out; to give practical effect to*” (Menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu). Implementasi suatu kebijakan publik sangat bergantung pada rumusan kebijakan yang akan disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) yang dikutip oleh

Abdul Wahap (1997) dalam Jamal (2016) bahwa proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Menurut Sabatier (1979) yang dikutip Abdul Wahab dalam Jamal (2016) menjelaskan pengertian implementasi publik sebagai berikut; “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, mencakup baik usaha-usaha maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Jamal (2016) 1. Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III (2004), Dalam pandangan Edwards III, implementasi

kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. 1) Komunikasi, Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. 2) Sumber daya, Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja. 3) Disposisi Watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang

baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di negara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan. 4) Struktur birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Istilah pelayanan berasal dari kata 'layan' yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela 2010). Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melali aktivitas orang lain yang langsung (Moenir, 2006). Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang terjadi dalam interkasi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan, (Sampara Lukman, 2002).

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hak-hak lain yang disebabkan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang diamsudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan, (Ratminto, 2005).

Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara N0. 63 Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 diuraikan bahwa instansi pemerintah sebagai kolektif yang meliputi satuannya/satuan organisasi kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, menjadi penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan pengguna jasa pelayanan publik adalah orang-orang masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima layanan dan instansi pemerintah.

Gaperz dalam (Sampara Lukman, 2002) mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu pada pengertian pokok: a. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, maupun keistimewaan aktraktip yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk. b. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan. Adapun pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat menurut (Moneir, 2006) adalah sebagai berikut: 1. Adanya

kemudahan dalam penguasaan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang dibuat-buat 2. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau hal-hal lain bersifat tidak wajar. 3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib, dan tidak pandang bulu. 4. Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan karena sesuatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya diberitahukan, sehingga orang tidak menunggu sesuatu yang tidak jelas.

Program Penambahan Jaringan Sambung Rumah DI PDAM Kabupaten Bulukumba, Semakin berkembangnya wilayah Kabupaten Bulukumba maka perlu untuk mempertimbangkan kondisi hidraulika pada komponen-komponen sistem distribusi air minum akibat adanya perubahan kondisi jaringan. Dalam kegiatan distribusi air bersih, sumber mata air yang dimanfaatkan memiliki kapasitas sumber ± 300 lt/dt. Melalui pengelolaan PDAM Daerah Kabupaten Bulukumba, mengingat jangkauan pelayanan untuk Kabupaten Bulukumba baru mencapai ± 54 % dari target nasional sebesar 80 % untuk penduduk perkotaan, sehingga sebagai instansi yang berwenang terhadap masalah air minum Kota Gresik, PDAM

Kabupaten Bulukumba meningkatkan pelayanannya dengan memanfaatkan jaringan distribusi yang telah ada (eksisting) dan merencanakan pengembangan jaringan baru agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara bekesinambungan.

Program jaringan sambung rumah di PDAM adalah sambungan pipa distribusi PDAM menuju meteran pipa rumah tangga. Dari sumber air, bisa *water treatment* maupun sumber daya air yang telah diolah, dialirkan melalui pipa transmisi menuju tempat penampungan air maupun langsung mulai dipisahkan dengan pipa distribusi. Pipa transmisi ukurannya bervariasi. Kondisi rumah yang mendapatkan Sambungan Rumah (SR) sesuai kriteria dan bersedia menjadi pelanggan PDAM.

METODE PENELITIAN

Jenis dan tipe penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif. teknik pengumpulan data yang digunakan ada Observasi. Melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian secara berulang terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama maupun berbeda. Wawancara yaitu melakukan kegiatan tanya jawab oleh penulis kepada informan penelitian yang implementasi penambahan

jaringan sambungan Rumah di PDAM di kabupaten Bulukumba. Dokumentasi ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji dokumen yang ada baik berupa referensi, buku, jurnal ataupun peraturan dan pasal yang berkaitan dengan penelitian ini guna melengkapi data yang diperlukan serta cara mengumpulkan data, dimana dokumen yang dianggap mendukung dan sesuai dengan masalah, baik berupa buku, literatur, laporan dan sebagainya.

Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala PDAM, Bagian Pengelolaan PDAM, Pegawai PDAM (Bagian Sumber) dan Masyarakat. teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Untuk meninjau dan mengetahui lebih lanjut peran Pemerintah dalam hal ini PDAM Kabupaten Bulukumba, melakukan beberapa tahap-tahap di antaranya adalah (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, dan (3) Disposisi.

Komunikasi

Untuk mengetahui bagaimana indikator komunikasi melalui indikator:

a. Transmisi, Hasil temuan yang di dapatkan di lapangan terkait dengan transmisi dalam komunikasi adalah dimana dalam suatu organisasi, suatu instansi pasti terdapat yang namanya miskomunikasi tetapi itu semua dapat terselesaikan bagaimana suatu organisasi atau instansi itu menyelesaikannya. Tidak terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan program penambahan jaringan sambung rumah, antara PDAM dan berbagai pihak yang terkait. Karena selaing PDAM yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Penambahan Jaringan Sambung Rumah, penggunaan sistem perpipaan untuk distribusi air bersih bagi masyarakat, juga di sediakan oleh Satker air minum Provinsi Sulawesi Selatan dan Pamsimas serta Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba. Dengan pengelolaan dan pemanfaatannya dibawah tanggung jawab dengan pemerintah kecamatan, kepala Desa/Kelurahan setempat, sehingga pengelolaannya masih di berikan kepada aparat kecamatan/desa/kelurahan dengan tetap berkoordinasi dengan sistem terkait

termasuk dengan PDAM. b. Dalam penelitian yang di lakukan, dah hasil yang di dapatkan di lapangan terkait dengan kejelasan, dalam pelaksanaan program penambahan jaringan sambung rumah PDAM di Kabupaten Bulukumba, dari data yang ada konsentrasi pelayanan masih berada di kawasan perkotaan Bulukumba, meliputi wilayah kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe dan kecamatan Bonto Bahari. dari data tersebut juga ditemukan 3 (tiga) wilayah kecamatan yang belum terlayani layanan air bersih sistem perpipaan yaitu kecamatan Kajang, Herlang dan Kecamatan Kindang. Namum dari hasil survey diwilayah tersebut sudat terdapat layanan air bersih perpipaan namum jumlah pelanggan yang dilayani belum diketahui dan status operasinya juga tidak berkelanjutan, karena terkendala biaya operasional pompa dan pemeliharaan jaringan. Kecenderungan lainnya yang terjadi adalah masing-masing rumah tangga yang memiliki jaringan air minum atau air bersih perpipaan juga terdapat sumur gali atau sumur dalam di rumah-rumha mereka sebagai sumber cadangan. c. Hasil yang di dapatkan di lapangan terkait dengan konsistensi, pemberian informasi terkait dengan pelaksanaan program Penambahan Jaringan Sambung Rumah

oleh PDAM konsisten dengan apa yang menjadi permasalahan masyarakat terkait dengan permasalahan air bersih, untuk selanjutnya di lakukan pemantauan dan perbaikan.

Sumber Daya

Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang mereflesikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedangkan secara teknologis, sumber daya berkaitan dengan kemampuan transformasi dari organisasi. a. Staff atau pegawai, keberhasilan suatu program pemerintah, itu tergantung bagaimana pelayanan yang di berikan oleh staff atau pegawainya. Pelayanan yang baik akan memberikan kesan yang baik kepada masyarakat. Terkait dengan pelayanan program sambung pipa yang dilakukan oleh PDAM, masyarakat merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang di berikan. Hal itu terbukti dimana masyarakat diberikan pemahaman terkait bagaimana keuntungan menggunakan sambun pipa oleh PDAM, karena masyarakat juga dapat menikmati air PAM yang

disediakan oleh PDAM. Selain itu, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat juga sedikit, yaitu 1000/kubitnya. Dibandingkan dengan penggunaan sumur bor, yang jika ingin menggunakan air harus menghidupkan mesin, secara otomatis akan mendapatkan tagihan pembayaran yang cukup lumayan besar jika di bandingkan dengan menggunakan air PAM. b. Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan di lapangan, sebelum melakukan pengerjaan, banyak hal yang perlu dipersiapkan, diantaranya adalah (1) Kebutuhan air, (2) Pembuatan sistem *loop* dan perombakan jaringan perpipaan, dan (3) Pengembangan jaringan distribusi. Penyelenggaraan pengembangan program penambahan jaringan sambung rumah, sarana dan prasarana Sanitasi memperhatikan keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan, terutama dalam upaya perlindungan terhadap baku mutu sumber air baku. Keterpaduan enambahan jaringan sambung rumah dengan sarana dan prasarana Sanitasi dilaksanakan berdasarkan prioritas adanya sumber air Baku. Fasilitas yang di pergunakan adalah Pipa, lem, keran air, *Power* (Listrik dan Bahan bakar), *Raw Water* (Retribusi) dan sebagainya.

Disposisi

Watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

a. Pengangkatan Birokrasi, Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan, PDAM kabupaten Bulukumba PDAM Bulukumba merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bulukumba yang menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial dan pelayanan umum dalam rangka memenuhi syarat kesehatan. Dalam pelaksanaannya, PDAM memberikan kewenangan tersendiri kepada PEMDES untuk mengatur permasalahan airnya sendiri, tetapi tetap PDAM memberikan bantuan terkait dengan permasalahan dan kebutuhannya.

b. Insentif, Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan di lapangan, Salah satu bentuk alternative pendanaan dalam pelaksanaan program

Penambahan Jaringan Sambung Rumah PDAM Kabupaten Bulukumba adalah (1) *Internal Cash Alternatif*, ini mengasumsikan bahwa semua kebutuhan investasi akan didanai dengan keuangan dari hasil operasional, (2) Menggunakan dana pinjaman dari bank komersial (3) Menggunakan dana dengan penerbitan obligasi daerah Dengan alternatif penerbitan obligasi ini maka kebutuhan biaya investasi dipenuhi oleh dana dari penjualan obligasi (dalam hal ini adalah penerbitan obligasi oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba).

KESIMPULAN

Dari penelitian yang di lakukan terkait dengan Implementasi Program Penambahan Jaringan Sambung Rumah di PDAM kabupaten Bulukumba, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan: Pelaksanaan Program Penambahan Jaringan Sambung Air di PDAM di Kabupaten Bulukumba. Melalui beberapa indikator: 1) Komunikasi. Dengan menggunakan beberapa pendekatan Transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dimana pada indikator komunikasi, hal yang paling menjadi syarat utama kesuksesan sebuah program adalah jika komunikasi diantara beberapa elemen yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut

terjalin dengan baik. Dalam pelaksanaan program sambung air di PDAM Kabupaten Bulukumba, bentuk komunikasi yang terjalin adalah setiap kecamatan atau desa bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ada di daerahnya, tetapi tetap berkordinasi dengan PDAM dan Dinas PU yang memiliki peranan penting untuk melaksanakan program sambung air tersebut. 2) Sumber Daya, Pendekatan dalam indikator sumber daya adalah staff atau pegawai dan fasilitas. Dalam pelaksanaan suatu pelayanan, staf atau pegawai merupakan kunci utama kesuksesan pelayanan tersebut. Dalam pelaksanaan program sambung air, pegawai yang turung langsung memantau dan memastikan semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat adalah mereka yang paham dan mengerti betul permasalahan yang di alami oleh masyarakat. Fasilitas yang dipergunakan juga merupakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. 3) Disposisi. Pendekatan dalam indikator disposisi adalah dimana menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial dan pelayanan umum dalam rangka memenuhi syarat kesehatan. Dalam pelaksanaannya,

PDAM memberikan kewenangan tersendiri kepada PEMDES untuk mengatur permasalahan airnya sendiri, tetapi tetap PDAM memberikan bantuan terkait dengan permasalahan dan kebutuhannya. Sedangkan indikator insentif, Sumber dana yang di gunakan untuk pengembangan pada unit air baku sampai unit produksi didanai oleh pemerintah pusat. Unit air baku akan didanai oleh APBN pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan unit produksi melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sedangkan unit distribusi ditangani oleh daerah, dimana dari distribusi utama/primer sampai distribusi sekunder oleh APBD I Provinsi Sulawesi Selatan dan dari distribusi sekunder sampai tersier atau pelanggan oleh APBD II dan atau swadaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, F. T., Gana, F., & Kase, P. (2015). Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner Dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. *JKAP*, 19(1), 43–58.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Edward III. (2004). *Implementing Public Policy*. Washinton DC: Congres.
- Fatma Talaqhu. (2014). *Enterpreneurial Government Dalam Persepsi Pejabat Birokrasi Pemerintah*

(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara) (Tesis Magister, Universitas Terbuka).

- Moenir, 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ratminto, 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winardi. J (2003). *Entrepreneur dan Entrepreneurship* (pp. 319–325). Yogyakarta: Kencana Prenada Media.
- Wahab, A. S. (1990). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Yogyakarta: Bumi aksara.